

## Pemerintah Larang Acara Perayaan Tahun Baru di Tempat Umum

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, guna mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 pasca libur Natal dan tahun baru 2020-2021, pemerintah memutuskan untuk melarang kerumunan dan perayaan tahun baru di tempat umum.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali secara virtual di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi pada Hari Senin (14/12).

Dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarves, Selasa (15/12), Luhut

meminta agar implementasi pengetatan ini dapat dimulai pada tanggal 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Adapun alasan yang mendasari keluarnya kebijakan tersebut adalah peningkatan kasus secara signifikan yang masih terus terjadi pascacalbur dan cuti bersama pada akhir Oktober 2020.

"Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pascacalbur setelah sebelumnya trennya menurun," ujar Luhut.

Luhut mengungkapkan sejumlah provinsi yang mengalami tren kenaikan kasus Covid-19, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Selatan. ● han

## 10 Lokasi Digeledah, KPK Amankan Uang Diduga Terkait Suap Bupati Banggai Laut

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 10 lokasi di Kabupaten Luwu dan Banggai Laut pada Senin (14/12) hingga Selasa (15/12). Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Banggai Laut Wenny Bukano.

"Sejak Senin-Selasa, tim penyidik KPK melaksanakan kegiatan penggeledahan di Luwu dan Banggai Laut pada 10 lokasi baik rumah dan kantor milik pemerintah dan swasta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (15/12).

Dari 10 lokasi yang digeledah, penyidik KPK mengamankan sejumlah uang dan dokumen.

Ali mengatakan, uang dan dokumen yang diamankan itu akan diverifikasi dan dianalisa untuk kemudian disita sebagai barang bukti.

Wenny ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang/jasa di Banggai Laut. Selain Wenny, lima tersangka lainnya adalah Rocky Suhartono Godiman selaku orang kepercayaan Wenny, Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono, Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono, Direktur PT Antarnusa Karyatama Mandiri Djufri Katili, dan Direktur PT Andronika Putra Delta Andreas Hongkiwang.

Dalam kasus ini, Wenny diduga memerintahkan Rocky untuk membuat kesepakatan dengan pihak rekanan yang

mengerjakan beberapa proyek infrastruktur di Banggai Laut. Selain itu, Wenny diduga mengondisikan pelelangan di Kabupaten Banggai Laut.

Untuk memenangkan rekanan tertentu dan agar kembali mendapatkan proyek pada Dinas PUPR Banggai Laut, rekanan sepakat menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk komitmen fee kepada Wenny melalui Rocky dan Hengky.

"Diduga ada pemberian sejumlah uang dari beberapa pihak rekanan antara lain HDO (Hedy), DK (Djufri), dan AHO (Andreas) kepada WB yang jumlahnya bervariasi antara Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Jumat (4/12) lalu.

Sejak September sampai November 2020, telah terkumpul uang lebih dari Rp 1 miliar yang disimpan di rumah Hengky.

Atas perbuatannya, Wenny, Rocky, dan Hengky selaku tersangka penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Hedy, Djufri, dan Andreas selaku tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ● mei

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## PENGLOLAAN PERBATASAN LAUT INDONESIA

Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) menerima cenderamata dari Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI An Kurnia dalam seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Bakamla di Jakarta, Selasa (15/12). Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia.

# Ma'ruf Amin Minta Dukungan Pers untuk Kelancaran Vaksinasi

Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan 63% keberhasilan program perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan 3M adalah peran dari media massa.

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan, untuk mengakhiri pandemi Covid-19, perubahan perilaku dengan disiplin protokol kesehatan 3M secara berkelanjutan di masyarakat harus diwujudkan. 3M adalah memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Menurut Ma'ruf, pemerintah menyadari untuk mengakhiri pandemi Covid-19 dibutuhkan perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Ma'ruf dalam sambutannya pada acara "Pembekalan Peserta Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku" secara virtual, Senin (14/12).

Ma'ruf berharap perilaku hidup bersih dan sehat tidak hanya diterapkan untuk sementara waktu sampai pemberian vaksinasi. Namun, diharapkan menjadi budaya dan gaya hidup baru masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kata Ma'ruf, untuk mewujudkannya perlu peranan penting dari insan pers.

"Terutama untuk mendedukasi masyarakat, melalui pemberitaan yang edukatif, informatif, akurat, dan komprehensif dalam menggambarkan fenomena Covid-19 dan berbagai dampaknya. Dengan demikian, masyarakat dapat semakin memahami cara-cara melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar secara tepat," katanya.

Di samping pemberitaan terkait perubahan perilaku, Ma'ruf mengatakan insan pers juga merupakan garda terdepan dalam menginformasikan program vaksinasi kepada masyarakat secara luas.

"Dalam menyuguhkan informasi mengenai vaksin Covid-19, insan pers perlu menyertakan data dukung dan penjelasan ilmiah dari para pakar, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat vaksin," tegasnya.

Bahkan secara khusus, Ma'ruf juga meminta dukungan pers untuk kelancaran vaksinasi.

"Secara khusus, saya juga

ingin meminta dukungan para insan pers untuk turut mendukung kelancaran diseminasi informasi vaksin yang telah kita nantikan bersama, dengan terus menyemarakkan semangat #VaksinasiUntukNegeri, #VaksinasiUntukNegeri, melalui pemberitaan-pemberitaan yang sesuai," harapnya.

63% Peren Media

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan 63% keberhasilan program perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) adalah peran dari media.

Diketahui, saat ini Dewan Pers bersama dengan Satgas Penanganan Covid-19 menyelenggarakan Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku dengan jumlah penerima fellowship lebih 4.000 peserta dari para insan media.

Doni dalam sambutannya mengapresiasi program ini karena membantu Satgas untuk mengoreksi berita mengenai Covid-19 yang tidak benar.

"Kami laporkan bahwa Satgas sangat-sangat terbantu dengan adanya program ini," ungkap Doni.

Lalu, kenapa program ini menjadi salah satu program prioritas?

"Dari data yang kami peroleh, keberhasilan sos-

ialisasi dalam menghadapi Covid-19 ini tidak terlepas dari peran media. Dan tercatat tidak kurang dari 63% keberhasilan program sosialisasi itu ditentukan oleh media," ungkapnya.

Sebelum ada program ini, Doni mengatakan sangat banyak sekali berita-berita yang menyimpang dari fakta dan kenyataan. Pihaknya di Satgas pun kesulitan untuk membantahnya dan mengoreksinya.

"Namun, sejak tiga bulan terakhir ini, setiap ada berita-berita yang mengarah kepada hoaks atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

kebenarannya, kami dibantu oleh teman-teman wartawan yang tergabung dalam Fellowship Journalisme," kata Doni.

Dia pun mengucapkan terimakasih kepada seluruh insan pers media yang telah membantu dalam menghadapi pandemi Covid-19. "Sekali lagi, kami keluarga besar Satgas Covid-19 menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wartawan yang juga adalah sebagai relawan yang telah bersedia membantu bangsa kita, membantu masyarakat kita, untuk bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19," tegasnya. ● mar

## Menhan Lantik Suryo Prabowo Jadi Ketua Tim Pelaksana KKIP

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), memimpin upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Tim Pelaksana dan Tim Ahli KKIP, Senin 14 Desember 2020.

Salah satu yang dilantik adalah Letjen TNI (Purn) Johannes Surjo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP. Pelantikan dilaksanakan di Ruang Hening Gedung Soedirman Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Pelantikan dihadiri oleh Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., Iren Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana serta sejumlah Pejabat Eselon I di lingkungan Kemhan.

Selain Suryo Prabowo, sejumlah tokoh lain yang dilantik adalah Ir. Sakti Wahyu Trenggono sebagai Sekretaris KKIP; Laksma TNI Sri Yanto, S.T., sebagai Kepala Sekretariat KKIP; Laksda TNI (Purn) Darwanto, S.H., M.A.P sebagai Ketua Bidang Perencanaan KKIP; Dr. Ir. Yono Reksoarjo, DIC. sebagai Ketua Bidang Alih Teknologi dan Offset KKIP; dan Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedi Swastanto, M.B.A., sebagai Ketua Bidang Litbang dan Standarisasi KKIP.

Selanjutnya Ir. Alex Janangkih Sinaga, M.Sc.Eng, sebagai Ketua Bidang Kerjasama dan Pemasaran KKIP; dan Dr. Ir. Slamet Soedarsono, M.P.P., QIA., CRMP., CGAP., sebagai Ketua Bidang Pendanaan dan Pembiayaan KKIP.

Sementara itu Tim Ahli KKIP antara lain Laksda TNI (Purn) Mulyadi, S.Pi., M.A.P., sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Pertahanan Laut; Marsda TNI (Purn) Danardono Sulistyio Adji, M.P.P., sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Kerjasama dan Offset; Prof. Dr. Suhono Harso Supangkat,

M.Eng sebagai Staf Ahli Bidang Pertahanan Cyber; Dr. Lydia Silvanna Djaman, S.H., M.H., sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan; dan Ir. M.G. Gatot Tetuko sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Penganggaran.

Selanjutnya Makmur Keliat, Ph.D, sebagai Staf Ahli Bidang Kerjasama Industri Pertahanan; Ir. Teguh Haryono, M.Sc., sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Litbang dan Stantarisasi; dan Rabin Hartari Indrajad sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Perencanaan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Karo Humas Setjen Kemhan) Brigjen TNI I.E. Djoko Purwanto, S.E., M.M., mengatakan, pelantikan Pejabat baru di jajaran KKIP ini didasarkan kepada Keputusan Ketua Harian KKIP, Nomor : KEP/92/KKIP/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan KKIP.

Djoko mengatakan, KKIP adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, KKIP memiliki visi mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam), yang didukung oleh industri pertahanan yang maju dan sumber daya manusia yang unggul, mengingat Industri Pertahanan Nasional merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. ● mei



IDN/ANTARA

## JENAZAH WAKASAD TIBA DI PAPUA

Prajurit TNI mengusung peti jenazah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Herman Asaribab tibanya di Bandara Theys Hiyo Eluay, Sentani, Jayapura, Papua, Selasa (15/12). Wakasad Letjen TNI Herman Asaribab tutup usia saat mendapatkan perawatan medis di RSPAD dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Trikora, Waena, Jayapura.

## KSP Nilai Vaksin Covid-19 Berbayar Tak Salah Aturan

JAKARTA (IM) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebutkan, pemerintah tak melanggar aturan dengan tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total. Sebab, pemerintah tetap menjamin terselenggaranya vaksinasi, tetapi diterapkan prinsip keadilan sehingga tidak semuanya gratis.

"Tidak menyalahi aturan. Memang vaksin digratiskan, hanya memang kita menggunakan prinsip keadilan yang basisnya adalah kepantasan, tetap saja tidak melanggar aturan," kata Donny, Selasa (15/12).

Prinsip adil yang dimaksud Donny bukan berarti memperlakukan seluruh warga secara sama, melainkan dengan cara yang pantas. Mereka yang berada di golongan mampu dinilai tidak pantas mendapat vaksin Covid-19 secara gratis. Sementara, mereka yang kurang mampu dianggap berhak mendapat vaksinasi cuma-cuma.

Hal ini, kata Donny, sama prinsipnya dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yakni mereka yang menggunakan kendaraan mewah tidak diperkenankan menikmati BBM jenis premium.

"Jadi keadilan itu kan bukan semuanya digratiskan, tapi bahwa mereka yang berkecukupan membayar, sementara yang kurang beruntung atau yang tidak berkecukupan atau berkekurangan yang digratiskan," ujarnya.

Donny menyatakan, pemerintah mengadakan vaksinasi mandiri bukan karena keterbatasan anggaran. Namun, dengan mekanisme ini, sebagian anggaran bisa dialihkan untuk memperkuat program bantuan sosial untuk kalangan tak mampu.

Ia juga mengatakan, ke depan, pemerintah akan menetapkan harga eceran tertinggi vaksin Covid-19. Mekanisme ini dapat mencegah rumah sakit mematok harga vaksin terlalu tinggi. ● han

## Mendagri: Pilkada Berlangsung Baik, Partisipasi Pemilih Capai 75,83 Persen

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 berlangsung dengan baik. Bahkan diklaim bahwa partisipasi pemilih mencapai 75,83 persen.

"Ini masih dinamis, masih bergerak, tapi per hari ini 75,83 persen," kata Tito melalui keterangan tertulisnya, Senin (14/12).

Tito mengatakan, tidak hanya Indonesia yang memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi di pelaksanaan pemilu di masa pandemi Covid-19.

Tito mengatakan, Amerika Serikat juga mendapatkan par-

tisipasi pemilih yang tertinggi saat pemilihan presiden yakni mencapai 66,7 persen.

"Dan ini adalah tertinggi selama 120 tahun Amerika menyelenggarakan Pilpres," ujarnya.

Selain itu, Korea Selatan yang juga menggelar pemilu di masa pandemi mendapatkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 66,2 persen. Angka itu, lanjut Tito tertinggi selama 28 tahun.

"Jadi kalau kita bisa mencapai 75,83 persen ini kita melebihi Amerika, melebihi Korea Selatan," ungkapnya.

Menurut Tito dengan persentase partisipasi pemilih

itu berarti ada sekitar 76 juta masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya di Pilkada 2020.

"Kami kira ini adalah suatu hal yang patut kita banggakan sebagai bangsa bahkan mungkin ini dengan adanya model-model baru baik kampanye daring. Kemudian juga pengaturan jam yang membuat tidak terjadi kerumunan, petugas TPS menjadi lebih ringan karena ritmenya konstan," tuturnya.

Mantan Kapolri ini menilai, model atau terobosan dalam Pilkada Serentak 2020 bisa menjadi model untuk pilkada atau pemilu di tahun ke depan. ● mei



IDN/ANTARA

PEMINDAHAN TERSANGKA PENGADAAN TANAH PEMAKAMAN Tersangka Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan periode 2015-2020 nonaktif Johan Anuar (tengah) tiba di Lapas Klas 1 Pakjo Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (15/12). JPU KPK memindahkan tersangka dugaan korupsi pengadaan Tanah Pemakaman Umum di Kabupaten OKU Sumatera Selatan Tahun 2013 dari Rutan Polres Jakarta Pusat ke Lapas Klas 1 Pakjo Palembang.

**PT ZEBRA NUSANTARA, Tbk. ("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN PINDAH ALAMAT**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham dan Pihak-pihak yang berkepentingan, bahwa per tanggal 16 Desember 2020, Kantor Pusat PT. Zebra Nusantara, Tbk. ("Perseroan") di Surabaya, untuk sementara berpindah alamat sebagai berikut :

**Alamat Lama :**  
PT ZEBRA NUSANTARA, Tbk.  
Jl. Kulisari IV No. 2-D Surabaya, 60291  
Telp. (031) 8416666, Fax. (031) 8470772

**Alamat Baru :**  
PT ZEBRA NUSANTARA, Tbk.  
Jl. Berbek Industri IV No. 7 Sidoarjo, 61256  
Telp. : 031-8411459, 8416666

Dengan demikian untuk alamat korespondensi dapat menggunakan alamat baru tersebut. Demikian atas perhatiannya terimakasih.

Sidoarjo, 16 Desember 2020  
Direksi Perseroan